



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI JAMIL
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 429436

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.824.917.500

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m²/294 m² di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.291.500.000
2. Tanah Seluas 600 m² di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 148.625.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m²/65 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.384.792.500

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 153.675.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 149.625.000
2. MOTOR, HONDA NC12A/CF A Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.050.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 788.812.594**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 3.767.405.094**III. HUTANG** Rp. 1.647.821.840**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.119.583.254

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.